

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI
PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disusun Oleh:

SINTA ANANDA

NIM. 150802057



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1434 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh

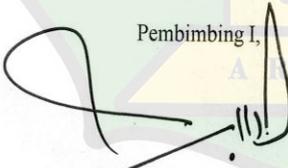
SINTA ANANDA
NIM : 150802057

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ade Irma, B. H. Sc., MA
NIP. 197309212000032004


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIDN. 2002079001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta diterima sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

SINTA ANANDA

NIM: 150802057

Pada Hari/Tanggal

Senin 23 Desember 2019 M

26 Rabiul Akhir 1441 H

**Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah**

Ketua,

**Ade Irma, B. H.Sc., MA
NIP. 19730921 20000 3 2004**

Sekretaris,

**Mirza Fanzkri, S.Sos.I., M.Si.
NIDN. 2002079001**

Penguji I,

**Eka Januar, M.Soc. Sc
NIP. 19840101 201503 1 003**

Penguji II,

**Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 19841125 2019 03 2012**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh**



SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Ananda
NIM : 150802057
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan pihak lain.

Banda Aceh, 23 Desember 2019

Yang menyatakan,



SINTA ANANDA
NIM. 150802057

ABSTRAK

Di lembaga pemerintah bagian humas mempunyai peran yang sangat penting untuk membuka ruang bagi masyarakat supaya mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance. Informasi yang disampaikan juga harus akurat, mudah, dan cepat. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat, bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat yang memosisikan diri sebagai gerbang informasi bagi publik dan menggandeng media massa dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja kepada masyarakat. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja dan hambatan apa saja yang terdapat dalam strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja. Hasil penelitian ditemukan bahwa strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah yaitu melalui media massa, media cetak maupun media teknologi informasi seperti baliho, spanduk, tabloid, media online dan media sosial, serta menyajikan berita seputar kegiatan yang telah dilaksanakan melalui website resmi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat, juga bekerjasama dengan wartawan dan berbagai media massa agar informasi program kerja pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat, humas melakukan rencana yang optimal sebelum informasi program kerja disampaikan kepada masyarakat. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat berperan penting dalam menunjang keberhasilan tata kelola pemerintahan, salah satunya dengan cara menyebarluaskan setiap informasi program kerja pemerintah kepada masyarakat salah satunya melalui media massa.

Kata Kunci; Strategi Pemerintah, Aceh Barat, Informasi, Program Kerja.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya dari jaman jahiliyah menuju jaman kepintaran.

Begitu banyak kesan dan manfaat yang dirasakan oleh penulis saat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah”. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga mendapatkan pelajaran bahwa tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha dan kerja keras.

Selama proses penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun akademis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Siti Nur Zalika selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ade Irma, B.H. Sc., MA selaku Dosen Pembimbing pertama dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I.,M.Si selaku Dosen Pembimbing ke dua yang telah

5. bersedia membimbing dan telah memberi banyak masukan serta saran selama penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis selama empat tahun duduk dibangku perkuliahan.
7. Papa dan mama tercinta. Nawardi dan Yusniar yang sangat luar biasa mendampingi penulis untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, untuk doa, cinta, dukungan, kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Kakak dan adik yang amat penulis sayangi. Hilda Yana Agustri dan M.fitri yang telah banyak memberikan semangat, dan dukungan yang tiada henti.
9. Amril Nuthihar, S.Ip. MPA selaku Kepala Sub bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian langsung di bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dan telah banyak membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.
10. Dedy Jefernai, ST selaku Sub bagian Informasi dan Dokumentasi yang telah memberikan data berupa hasil wawancara dan dokumentasi seputar Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah, sekaligus sebagai narasumber kunci dalam penelitian ini.

11. Sahabat tercinta yang telah banyak membantu, mendukung dan memberi semangat kepada peneliti.
12. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.



Banda Aceh, 23 Desember 2019

Penulis,

Sinta Ananda

DAFTAR ISI

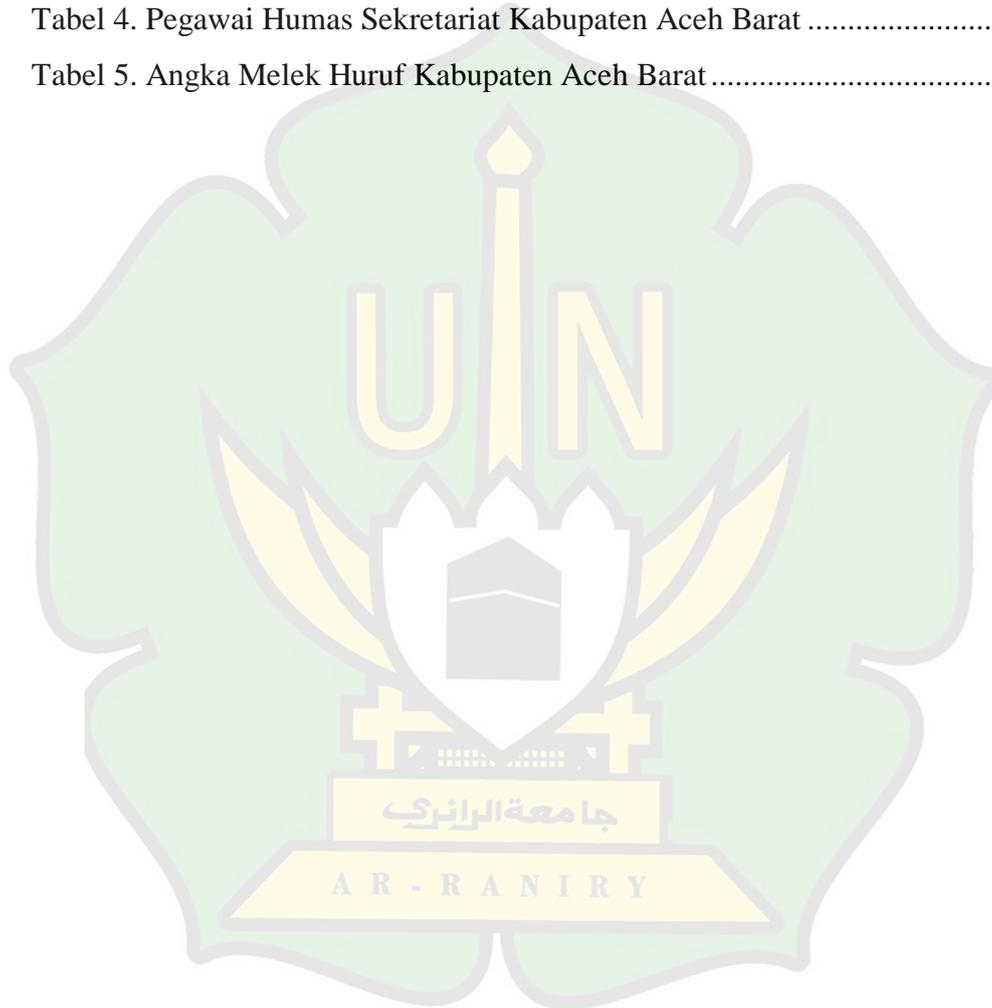
LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Penelitian Terdahulu.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	8
2.2. Tinjauan Tentang Strategi	8
2.3. Tinjauan Tentang Pemerintah.....	12
2.4. Tinjauan Tentang Humas Di Lembaga Pemerintah.....	13
2.5. Tinjauan Tentang Media <i>Relations</i>	18
2.6. Tinjauan Tentang Informasi.....	22
2.7. Tinjauan Tentang Program Kerja	25
2.8. Kerangka Pemikiran	27
BEB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.3. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
3.4. Sumber Data	29
3.5. Populasi dan Sampel.....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	33
4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Barat	33
4.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Barat	34
4.1.3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.....	35
4.1.4. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	35
4.1.5. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat	37
4.2. Hasil Penelitian	42
4.3. Pembahasan	49
4.3.1. Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah.....	49
4.3.2. Hambatan Dalam Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah	54
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

AR - RANIRY

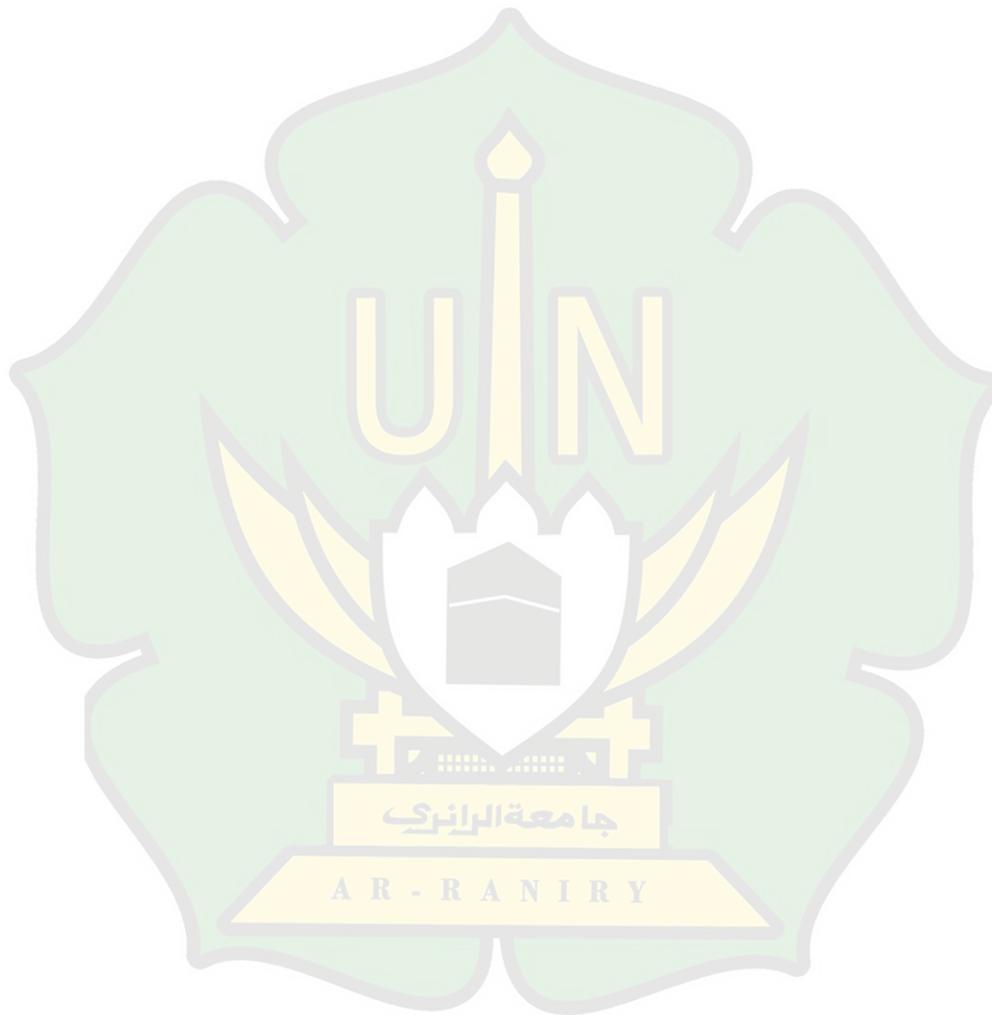
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2. Informan Penelitian.....	29
Tabel 3. Data Kependudukan Kabupaten Aceh Barat.....	34
Tabel 4. Pegawai Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat	38
Tabel 5. Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Barat	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Komunikasi Media Relations	21
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	27
Gambar 3. Alur Pelayanan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, wajib bagi pemerintah untuk menerapkan ke sembilan prinsip Good Governance, agar dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan Good Governance, dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik. Prinsip-prinsip dari Good Governance yaitu adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, keadilan, kesetaraan, konsensus, visi misi yang strategis, efektif dan efisien.¹

Keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu dari ke sembilan prinsip Good Governance yang wajib diwujudkan oleh pemerintah kepada publik. Salah satunya yaitu keterbukaan informasi publik, baik itu informasi tentang kebijakan, program kerja, pemabangunan dan kegiatan pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak memperoleh informasi publik, dan menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana

¹ Rio Muhammad “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Klanten”, *jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*. Hlm. 01-03

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan, serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.²

Keterbukaan informasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Apapun bentuk informasi yang disebarluaskan oleh pemerintah, publik berhak untuk mengetahui. Pada dasarnya informasi dari pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan tersebarluaskan informasi, masyarakat bisa mengetahui dan mengerti tentang kegiatan yang sedang dilakukan pemerintah.

Partisipasi masyarakat juga menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan program kerja pemerintah yang telah ditetapkan, karena tanpa adanya peran serta masyarakat program kerja dari pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. Masyarakat mempunyai hak penuh untuk mengetahui informasi program kerja dari pemerintah, karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. pemerintah juga harus menerima masukan dari masyarakat untuk memperoleh partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Di lembaga pemerintah humas berperan sebagai pengelola informasi dan penyebaran informasi, seperti informasi program kebijakan, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah. Dapat dikatakan humas sebagai bentuk pemberi pelayanan administratif dalam bidang informasi kepada

² Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

masyarakat, sehingga dengan itu masyarakat dapat menaruh kepercayaan kepada pemerintahnya yang telah diberi tanggung jawab.³

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat khususnya bagian Humas bertanggungjawab dalam memberikan informasi dan sekaligus sebagai tempat bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah, sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, karena pada dasarnya di lembaga pemerintah humas berfungsi untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara pemerintah dengan masyarakat, yang akan mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan kinerja pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, bahwa pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakatnya secara cepat, tepat dan akurat. Karena telah menjadi kewajiban badan publik Negara untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.⁴

Salah satu wujud usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu dengan cara melaunching Daftar

³ Muhammad Aras "kegiatan government publik relation dalam membangun komunikasi dengan dunia persamaan" *jurnal marketing communication dapartermen, fakulty of economic and communication* hal .02.

⁴ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, *Peluncuran Daftar Informasi Publik Kabupaten Aceh Barat, Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2020 Dari Situs <https://aceh.antaraneews.com>*

informasi publik (DIP) dalam rangka mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik. Tersedianya daftar informasi publik (DIP) baik yang terbuka maupun yang dikecualikan dapat menjadi pedoman bagi jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengelola informasi yang kredibel dan akuntabel sehingga salah satu tujuan tata kelola pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan hadirnya pemerintahan yang Clean Government.⁵

Daftar informasi publik (DIP) sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mendukung program pemerintah, sekaligus untuk mengetahui transparansi tata kelola pemerintah, sehingga publik dapat lebih mudah untuk mengakses informasi publik. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat seluas-luasnya sesuai dengan regulasi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, dengan cara menghadirkan daftar informasi publik (DIP). Maka hal ini membuat peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam tentang “strategi yang digunakan humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah”. Dengan mengetahui strategi yang ditetapkan dalam menyebarluaskan informasi publik dapat lebih mudah untuk memahami daftar informasi publik (DIP) yang di

⁵ Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, *Lauching Daftar Informasi Publik (DIP)*, diakses pada tanggal 13 januari 2020 dari situs <http://acehbaratkab.go.id>

launching oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menunjang keterbukaan informasi publik.

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah ?
2. Hambatan-hambatan dalam strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan tentang program kerja pemerintah daerah?

2.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan yang dikaji lebih lanjut untuk mengetahui arah penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah daerah?

2.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Akademik, untuk menambah sumber referensi yang bermamfaat dalam penelitian selanjutnya di bidang humas sebagi pusat informasi.

2. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai bentuk informasi bahwasannya pemerintah Kabupaten Aceh barat telah semaksimal mungkin dalam mencoba menganyomi dan melayani masyarakat salah satunya pelayanan akan informasi.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Wawan Wahyudi, 2016	<i>Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat</i>	Mengoptimalkan website pemda sambas.go.id, mengelola TV Humas Sedda, membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi satuan kerja perangkat daerah, dan menyelenggarakan komunikasi dua arah melalui Sms aduan masyarakat.

Berbedaan : Penelitian yang dilakukan Wawan Wahyudi, untuk mengetahui

keabsahan data digunakan cara triangulasi atas data yang diperoleh.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Anna kus, adam idris, jamal amin.2016	Strategi Humas Pemkot Bontang Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Di Kelurahan Gantung Kota Bontang	Mealui media cetak yaitu koran, majalah, bulletin spanduk, baliho dan leaflet, media elektronik, yaitu melalui siaran televisi dan radio; serta media komunikasi tatap muka yaitu melalui kegiatan dialog interaktif antara pemerintah kota dan masyarakat.

Berbedaan: Penelitian yang dilakukan Anna Kus, Adam Idris, Jamal Amin, Humas Pemkot Bontang berusaha agar informasi tentang pembangunan tersampaikan kepada masyarakat.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rudi Satria, Herru Prasetya Widodo, 2017	Strategi Humas Pemerintah Daerah Kabuapten Sambas Dalam Meningkatkan Citra Kabupaten	Menjalin hubungan baik dengan semua media yang beredar di kabupaten sambas baik cetak maupun elektronik, memanfaatkan dunia maya (internet) sebagai media memperkenalkan program kerja dan agenda pemerintah, mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD), membangun situs atau website

Berbedaan : Penelitian yang dilakukan Anna Kus, Adam Idris, Jamal Amin, Lebih kepada peningkatan citra kabupaten, bukan berfokus pada informasi yang disebarluaskan diterima atau tidak oleh masyarakat.

Sumber : Hasil Kajian Penulis, 2019

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi pustaka, peneliti menemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan mengenai penelitian ini, serta dokumen arsip-arsip yang mendukung sebagai pedoman pelaksanaan dalam penelitian. Dilakukan guna menambah pengetahuan dalam melengkapi penelitian yang berkaitan dengan “Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarkan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah”.

2.2. Tinjauan tentang Strategi

1) Definisi Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang artinya adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi strategi menentukan lingkup dan arah suatu pengembangan organisasi dalam menentukan strategi yang kompetitif.⁶ Peranan dan kontribusi strategi tidak terbantahkan karena riset tentang strategi sudah dilakukan selama beberapa dekade, sehingga saat ini belum ada kepastian mengenai pendapat tentang

⁶ Buttterick Keith, *Pengantar Public Relations Teori Dan Praktik*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 153

strategi, dikarenakan dua faktor yang pertama, strategi bersifat multi dimensional, dan yang kedua strategi bersifat situasional.⁷

Strategi merupakan sebagai sebuah pengambilan keputusan menyangkut tiga parameter utama, yang pertama siapa yang menjadi target dan siapa yang tidak akan ditarget, yang kedua produk dan jasa apa yang ditawarkan kepada masyarakat, dan sasaran produk dan jasa apa yang tidak akan ditawarkan, yang ketiga aktivitas apa yang akan dan tidak akan dilakukan dalam rangka mewujudkan itu semua. Pentingnya pilihan strategi menyangkut apa yang bakal menjadi fokus organisasi dan apa yang tidak akan dilakukan organisasi.⁸

Strategi dapat dikatakan juga cara yang alternatif yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan bagian penting dalam mengembangkan semua jenis kegiatan organisasi, strategi dapat dikatakan sebuah metode atau cara yang digunakan oleh organisasi untuk bergerak dari satu posisi keposisi yang lain, maka dari itu strategi menjadi peta jalannya sebuah organisasi.⁹

2) Proses Penyusunan Strategi

Landasan umum dalam proses penyusunan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah yang muncul.
2. Mengevaluasi mengenai pola dan kadar pada unit sasarannya
3. Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran.

⁷ Tjiptono Fandi, Chandra Gregorius, *Pemasaran Strategik*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2012)

⁸ Butterick Keith, *Pengantar Public Relations Teori Dan Praktik*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 153

⁹ Ceverthon Peter, *Managemen Library The Essential Guide To Brand Managemen*, (New Delhi, Kogan Page India Pvt.Ltd, 2005), hal. 1

4. Memilih beberapa strategi.
5. Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau perturan pemerintah dan lain sebagainya.
6. Mengkomunikasikan dan penilaian atau evaluasi hasil kerja.¹⁰

3) Tahap-Tahap dalam kegiatan Strategi

1. Penemuan Fakta

Pada tahap ini dilakukan penemuan fakta dilapangan atau hal-hal yang berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi masyarakat dengan kebijaksanaan pihak pemerintah. Setelah menemukan fakta dilapangan, maka data, fakta, dan informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pengambilan keputusan.

2. Perencanaan dan Penyusunan Program Kerja

Pada tahap ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang sejalan dengan kepentingan publik.

3. Penyampaian Pesan

Proses ini merupakan tindak lanjut setelah melakukan perencanaan. Pada tahap ini organisasi harus bisa melakukan tindakan berdasarkan rencana matang yang sudah dibuat. Tindakan dilakukan sesuai dengan fakta yang sudah ada sehingga dapat menyampaikan pesan dengan efektif yang dapat mempengaruhi masyarakat.

¹⁰ Abdurrahman Nana Herdiana, Manajemen Pemasaran Strategi, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2015) hal. 14

4. Komponen sasaran.

Komponen sasaran pada umumnya adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan yang disebut juga publik sasaran (*target sasaran*). Komponen sasaran yang ada pada strategi pemerintah pada dasarnya berfungsi untuk mengarahkan informasi atau pesan tersebut keposisi yang telah ditargetkan sebelumnya yaitu masyarakat luas.

5. Evaluasi

Evaluasi adalah tahap penilaian hasil dari riset awal sehingga perencanaan program, serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang digunakan. Tahap ini dikatakan sebagai tahap penafsiran hasil kerja.

4) Manfaat Strategi

Penetapan strategi dalam sebuah organisasi dapat memberi manfaat dalam sebuah organisasi, manfaat dari strategi yaitu sebagai berikut :

1. Membantu dan membuat organisasi menjadi lebih efektif.
2. Mengidentifikasi keunggulan komprehensif bagi organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko.
3. Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk mencegah terjadinya masalah di masa akan datang.
4. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivikasi mereka pada tahap pelaksanaan strategi.¹¹

¹¹ *Ibid*, hal 15

2.3. Tinjauan tentang Pemerintah

1) Definisi Pemerintah

Pemerintah adalah sebagai alat Negara untuk menjalankan tugasnya. istilah pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit di maksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif sedangkan pemerintah dalam arti luas ialah semua organ Negara termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹²

2) Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintah presiden dibantu oleh wakil presiden dan harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan serta peran dari masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.¹³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang dalam hukum administrasi dikenal dengan “asas-asas umum pemerintahan yang layak”, pemerintah

¹² Cristine, Khansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, hal. 17

¹³ H.A.W Widjaja, *penyelenggaraan otonomi di Indonesia*, (Jakarta, PT raja grafindo persada, 2004), hal.37

daerah diberi hak dan kewajiban dalam menjalani pemerintahannya, hak dan kewajiban daerah tersebut antara lain:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan
8. Mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan per Undang-Undangan.¹⁴

2.4. Tinjauan Tentang Humas di Lembaga Pemerintah

1) Definisi Humas

Di lembaga pemerintahan humas berperan sebagai penyampaian informasi. Keberadaan humas di lembaga pemerintah merupakan suatu keharusan, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penyebaran informasi, seperti informasi tentang kebijakan, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat.¹⁵

¹⁴ Abdullah Rozali, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemelihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta, pt raja grafindo, 2005), hal. 27

¹⁵ Mukarom Zaenal, Wijaya Laksana Mahibuddin, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Bandung: cv pustaka setia, 2015) hal. 38

Humas atau *public relation* merupakan sebagai segala bentuk kegiatan manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajemen secara keseluruhan, seperti pengorganisasian perencanaan, kepemimpinan, dan penelitian.

Humas atau publik relations adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis, menasehati, menasehati pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan publik.¹⁶

2) Peran Humas di Lembaga Pemerintah

Peran humas di lembaga pemerintah sangat berkaitan dengan tujuan utama yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, pada dasarnya humas harus bisa memberikan identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mengkomunikasikannya sehingga dengan itu publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pemahaman yang jelas tentang organisasi tersebut. Adapun konsep dari perannya humas di lembaga pemerintah diantaranya:

1. Dapat mempengaruhi individu, kelompok atau masyarakat, dan akan menjadi sasaran dengan tujuan untuk mengubah dan mempengaruhi pendapat dan opini publik melalui kegiatan komunikasi Public Relation.
2. Sebagai upaya untuk pemulihan terhadap suatu kegagalan yang telah terjadi sehingga menimbulkan citra negatif organisasi, dan tindakan

¹⁶ Ruslan, Rosady, *Manajemen Publik Relations Dan Media Komunikasi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada) hal. 26

humas selanjutnya adalah upaya pemulihan kembali nama baik pemerintah di mata masyarakatnya.¹⁷

3) Fungsi Humas di Lembaga Pemerintah

Humas di lembaga pemerintah berfungsi membantu dan meningkatkan marketing, terutama promosi citra organisasi, akan tetapi humas bukan hanya membantu tetapi juga mempunyai aktifitas pemasaran lainnya. Sesungguhnya humas memiliki tanggung jawab menejer sesuai dengan fungsinya terhadap masyarakat.¹⁸

Terdapat tiga fungsi humas dalam menyelenggarakan komunikasi dua arah, yang secara lebih terperinci yaitu:

1. Memberikan penerangan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga pemerintah dan kepentingan khalayak.
2. Mengukur dan menafsirkan pendapat, sikap, perilaku masyarakat terhadap lembaga pemerintah sehingga tercapainya visi misi dari pemerintah
3. Melaksanakan dan mengembangkan setiap program yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan saling pengertian antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjalinnya kerja sama.¹⁹

¹⁷ *Ibit.* Hlm. 40

¹⁸ *Ibit.* Hlm.55

¹⁹ *Ibit.* Hlm. 41

4) Tugas Humas Di Lembaga Pemerintah

Tugas humas merupakan kerja keras yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh praktisi humas di tempat mereka bekerja. Adapun tugas yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program kerja, pembangunan, dan kegiatan pemerintah.
2. Mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat.
3. Menyampaikan informasi kebijakan, program kerja, pembangunan, kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat.
4. Menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah.

5) Tujuan Humas di Lembaga Pemerintah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diraih, tujuan merupakan sesuatu yang ingin dituju oleh humas, sehingga dengan adanya tujuan tidak melenceng dari sasaran. Seorang praktisi humas harus merumuskan tujuan secara jelas, spesifik, dan dinyatakan dalam bentuk

tertulis tentang apa saja yang mesti dicapai oleh humas dalam periode waktu tertentu.²⁰

Tujuan humas di lembaga pemerintah antara lain ialah menciptakan pemahaman publik, membangun citra korporat, membangun opini publik yang baik, serta membentuk kerja sama dengan media *relations*. Tujuan humas yang perlu dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan pemahaman, berupaya menciptakan saling pengertian antara organisasi dan publik.
2. Membangun citra korporat, citra adalah pendapat publik tentang organisasi yang menyangkut tentang pelayanan, kualitas produk, budaya dalam organisasi dan lainnya.
3. Membentuk opini publik, opini publik merupakan ekspresi publik mengenai persepsi dan sikap terhadap organisasi.
4. Membentuk kerja sama, pada tahap ini humas sudah pada tahap tindakan nyata, artinya sudah tercipta jalinan kerja sama dalam bentuk perilaku tertentu yang mendukung keberhasilan organisasi.²¹

²⁰ Kriyantono Rachmat, *Public Relations Writing*, (Jakarta, kencana,2008) hal. 6

²¹ *Ibit*. Hlm. 7

2.5. Tinjauan tentang *Media Relations*

Media relations merupakan salah satu program humas untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Peran media sangat berpengaruh dalam pembentukan citra pemerintah yang baik di mata masyarakat, karena produk dari media berupa berita yang akan dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

Pemberitaan yang kurang baik akan berdampak kurang baik juga terhadap citra pemerintah, begitupun sebaliknya berita yang baik akan membawa dampak yang baik juga terhadap citra pemerintah. Oleh sebab itu, humas di lembaga pemerintah harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan media, yaitu dengan memberikan informasi atau berita kepada setiap media yang sesuai dengan fakta.

Perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap bentuk-bentuk media massa memberikan pengaruh yang berarti bagi pemerintah. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan yang baik pula bagi pemerintah, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang organisasi pemerintah.²²

Pengertian *media relations* berdasarkan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan dengan media, sehingga dapat disimpulkan pengertian *media relations* adalah hubungan yang dibangun dan dikembangkan dengan media

²² Iriantara, Yosol, *Media Relations Konsep, Pendekatan, Dan Praktik*, (Bandung: Simbosa Rakatama Media, 2008), hal,45

untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan masyarakat maupun pemerintah.²³

Dalam menyebarluaskan informasi pemerintah, humas membutuhkan dukungan media dalam strategi penyebarluasan informasi. Terdapat beberapa jenis media *relations* sebagai media-media utama bagi kegiatan humas dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di antaranya :

1. Media Pers, media pers merupakan media yang terdiri dari media cetak yaitu koran, majalah, buku petunjuk khusus, buku tahunan, dan laporan tahunan yang diterbitkan secara umum.
2. Media teknologi informasi, merupakan media yang terdiri dari media online dan media sosial.
3. Audio Visual merupakan media yang berbentuk kaset video atau gabungan film-film dokumenter.
4. Radio, radio merupakan media yang meliputi semua jenis radio lokal maupun nasional yang dipancarkan secara luas.
5. Televisi, televisi merupakan media penyebaran informasi dapat melalui televisi nasional maupun regional.
6. Pameran, dengan adanya pameran, humas dapat memanfaatkan pameran yang diadakan disuatu tempat untuk memperkenalkan produk.

²³ *Ibit.* Hlm 45

Masih banyak bentuk-bentuk dari media *relations*. Seiring dengan revolusi waktu dan kemajuan teknologi, bisa dipastikan bahwa media tersebut akan semakin bervariasi di masa akan datang.²⁴

Media *relations* menjadi penting bagi kegiatan dan program humas di karenakan memiliki kekuatan, bukan sekedar mampu menyampaikan pesan kepada jutaan khalayak sekaligus, namun juga dapat mendidik, mempengaruhi, menginformasikan, dan menghibur. Media juga memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, serta dapat mengubah pendapat dan perilaku.²⁵

Komunikasi yang harmonis antara humas dengan publik akan berjalan dengan baik jika didukung dengan komunikasi yang jujur, dengan memanfaatkan media sebagai sarana penyebarluasan informasi. Dalam menjalin hubungan baik dengan media, humas tidak boleh menutup mata sehingga humas harus menerapkan prinsip-prinsip untuk menjalin serta menjaga hubungan baik dengan pers, salah satunya dengan cara:

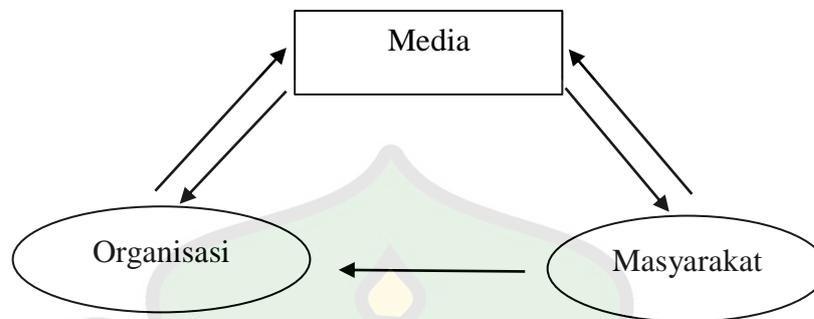
1. Melayani media, agar terciptanya hubungan yang baik, melayani dan memahami apa kebutuhan media menjadi hal yang utama
2. Menyediakan salinan yang baik, salinan ini dapat berupa data tertulis, foto serta video
3. Bekerjasama dalam penyediaan materi.²⁶

²⁴ Coulson, thomas chollin, public relation : pedoman praktis untuk humas (jakarta, bumi aksara,2002) hal 34

²⁵ *Ibid.* Hlm. 35

²⁶ Kriyantono racmat, public relation writing, (jakarta, kencana , 2008), hal 6

Gambar 1. Alur Komunikasi Media Relations



Dari gambar tersebut jelas menunjukkan, organisasi menyampaikan informasi, gagasan atau citra melalui media massa kepada publik. sedangkan publik, bisa menyampaikan aspirasinya, harapan, keinginan atau informasi melalui media massa pada organisasi. Media massa bukan hanya sekedar mampu untuk menyampaikan suatu pesan kepada publik, namun juga memiliki fungsi untuk mendidik, mempengaruhi, menginformasikan dan menghibur. Maka dari itu media massa juga memiliki potensi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, membangkitkan kesadaran, serta dapat mendorong tindakan.²⁷

1) Manfaat *Media Relations*

Manfaat dari *media relations* adalah untuk publisitas, yang merupakan suatu upaya untuk mempublikasikan suatu informasi yang berasal dari humas agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, penggunaan *media relations* akan sangat

²⁷ *Ibid.* Hlm 6.

menentukan keberhasilan pelaksanaan humas dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah yang disesuaikan dengan sasaran publik.

2) Tujuan Media *Relations*

Perusahaan atau organisasi yang menggunakan media *relations* merupakan organisasi yang membutuhkan dukungan dari media dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pada media *relations* diataranya :

1. Untuk memperoleh publisitas seluas-luasnya terhadap informasi yang disebarluaskan
2. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liput, laporan, ulasan).
3. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga
4. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh saling percaya dan menghormati.²⁸

2.6. Tinjauan Tentang Informasi

1) Definisi Informasi

Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau disebut juga dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh seseorang yang berupa pernyataan, gagasan pendapat, baik berupa data maupun fakta dilapangan, yang disediakan dalam berbagai bentuk jenis format.²⁹

²⁸ *Ibid.* Hlm. 37

²⁹ M. Yunup Pawit, *ilmu informasi, komunikasi, dan perpustakaan*, (Jakarta. PT bumi aksara, 2009), hal. 11

2) Jenis Informasi

Jenis informasi sangat beragam, baik dalam jenis, tingkat, maupun bentuknya. Informasi biasa yang banyak tersedia di mana-mana, sebenarnya jenis informasi biasa bisa berubah menjadi informasi yang luar biasa atau bahkan menjadi penting kedudukannya jika hal tersebut berkaitan dengan peristiwa besar di masyarakat. Jenis informasi bisa digunakan untuk memudahkan arah dalam mengelompokkan informasi tersebut sesuai dengan sifat dan karakteristik yang dimiliki. Di samping itu, bisa digunakan untuk mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan di dunia yang menjadi pusat informasi, bahkan dilingkungan masyarakat sendiri.³⁰

3) Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai jika informasi tersebut dapat memberi manfaat ke pada banyak orang. Adapun manfaat dari informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan. Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena hal-hal yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya sehingga dapat menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan.

³⁰ *Ibid.*.Hlm. 14.

3. Mengurangi resiko kegagalan. Adanya informasi resiko kegagalan akan dapat diantisipasi dengan baik sehingga kegagalan dapat dikurangi dengan cara pengambilan keputusan yang tepat.
4. Memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian sasaran, yang telah ditetapkan secara lebih baik berdasarkan informasi yang diperoleh.³¹

4) Bentuk informasi

Informasi pada masa sekarang tidak hanya sebagai pengumpulan data dan pengolahannya menjadi informasi. Tetapi juga mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, pengukuran, dan pengendalian. Bentuk dari informasi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Informasi pengumpulan data, yaitu Informasi berupa akumulasi atau disebut juga sebagai pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan.
 2. Informasi pengarahan perhatian yaitu informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah yang menyimpang.³²
- #### 5) Sumber Informasi

Informasi ada di mana-mana baik itu di lingkup masyarakat, lembaga, majalah, surat kabar, dan di tempat-tempat lainnya, di mana peristiwa tersebut terjadi akan tercipta informasi, sumber-sumber informasi banyak jenisnya, seperti buku, majalah, surat kabar, radio, televisi, dan media rekaman

³¹ Moch Irfan, Rusdiana, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2014) hal. 87

³² *Ibid.*. Hlm. 91.

informasi lainnya, itu merupakan tempat disimpannya atau disebut juga dengan sumber-sumber informasi khususnya informasi terekam.³³

2.7. Tinjauan Tentang Program Kerja

1) Definisi Program Kerja

Program kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan. Program kerja akan menjadi tolak ukur pencapaian kinerja, adapun pertanggungjawaban program kerja biasanya dilakukan pada akhir pengurusan dengan format laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota institusi. Pada dasarnya program kerja harus dirancang secara terperinci, terarah dan sistematis., karena pada hakikatnya program kerja sebagai pegangan dalam mencapai tujuan organisasi.³⁴

2) Tahapan Penyusunan Program Kerja

Perencanaan (*planning*) merupakan hal terpenting dalam penyusunan program kerja, sebab perencanaan dibuat karena sudah mendapatkan informasi yang sedang berlangsung, evaluasi yang telah dilakukan dengan berorientasi memandang jauh ke depan. Perencanaan adalah awal untuk bertindak, dengan langkah kecil bisa membuat sesuatu menjadi besar. Setelah program kerja disusun maka dibahas pada rapat kerja selanjutnya dikembangkan melalui pembagian tugas (*organizing and staffing*), setelah itu

³³ *Ibid.*, Hlm. 17.

³⁴ Perspektif baru bisnis dan ekonomi, *program kerja jadi syarat sukses berbisnis*, Maret 2019, di akses pada tanggal 27 Maret 2019 dari situs: <https://www.wartaekonomi.co.id>

diberikan arahan (*directing*) serta dilakukan pengawasan (*controlling*) agar terarah sesuai dengan program kerja yang telah dibuat bersama.³⁵

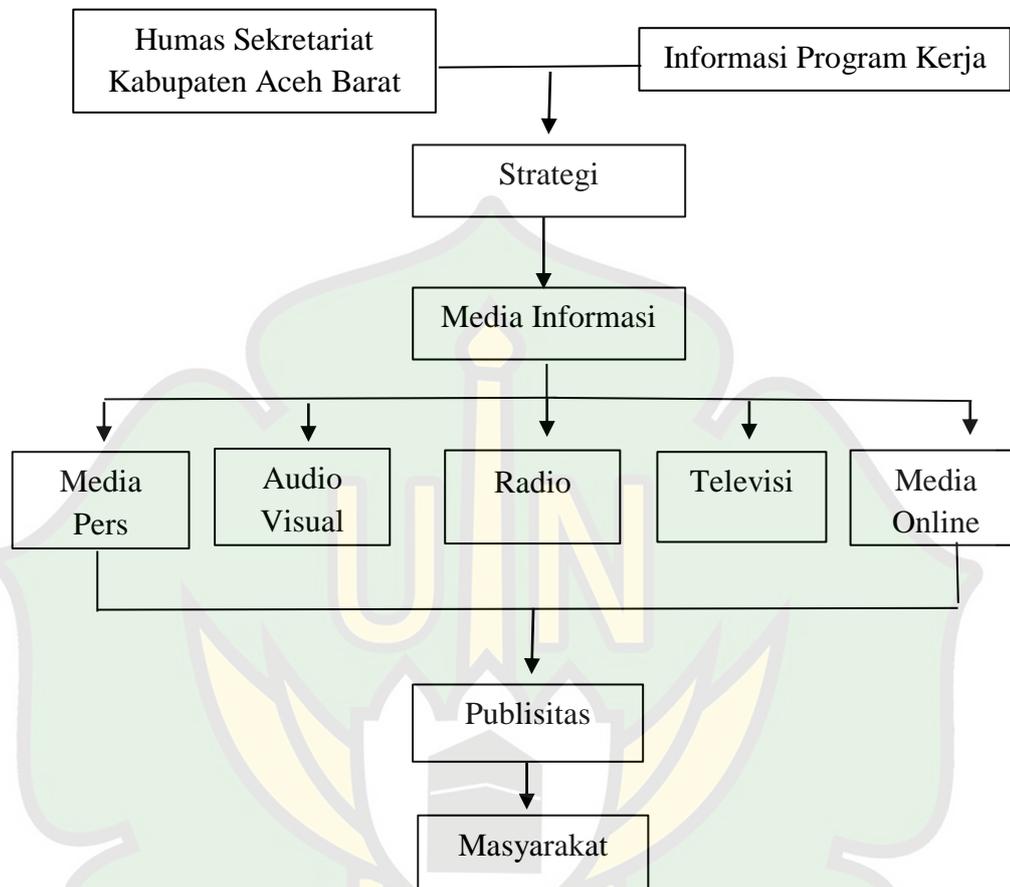
Langkah dalam menyusun program kerja yang efektif dan berdampak adalah sebagai berikut:

1. Tentukan tujuan dengan jelas, kejelasan merupakan hal utama dalam membuat program kerja. Tujuan yang tidak jelas akan menjadi hambatan dalam menuju kesuksesan.
2. Tuliskan dan ukur tujuan, setelah memiliki tujuan tuliskan tujuan dengan jelas untuk mengukur kelayakan dari tujuan tersebut.
3. Tentukan target waktu, membuat target waktu akan membantu organisasi dalam mengambil tindakan sesuai dengan rencana organisasi.³⁶

³⁵ Husaeri priatna, Program Kerja, Maret 2019 diakses pada tanggal 27 Maret 2019, dari situs <https://Www.Slideshere.Net>

³⁶ Perspektif baru bisnis dan ekonomi, *program kerja jadi syarat sukses berbisnis*, Maret 2019, di akses pada tanggal 27 Maret 2019 dari situs : <https://www.wartaekonomi.co.id>

2.8. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Dari skema diatas dapat digambarkan pola kerangka pemikiran penelitian ini adalah Humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat sebagai pengelola informasi dan sebagai penyebarluasan informasi kepada masyarakat, yang akan menjembatani kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. informasi tersebut mengharuskan humas untuk mempunyai strategi yang efektif, agar dapat terjalin hubungan baik dengan media, maka dari itu informasi dapat tersebarluaskan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan media kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk menjelaskan tentang “strategi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarkan informasi tentang program kerja pemerintah daerah”. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³⁷

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor bupati Kabupaten Aceh Barat, khususnya di bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat, yang beralamat di jalan Gajah Mada-Meulaboh 23617. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Agustus.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang akan menjadi sumber data. Informan dalam penelitian ini ialah pihak humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat yang terlibat langsung dengan pengelolaan dan penyebaran

³⁷ Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7D, (Bandung : Alfabeta, 2007, hal 215).

informasi tentang program kerja pemerintah daerah. Adapun informan dalam penelitian ini antarlain sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Amril Nuthihar, S.IP, MAP	• Kepala Bagian Humas
2.	Dedi Jefernai, ST	• Sub Bagian Informasi Dan Dokumentasi
3.	Andi Kurniawan, ST	• Sub Bagian Pemberitaan Dan Pengelolaan Data
4.	Zafriyanti, SE	• Sub Bagian Publikasi dan Media Elektronik

Tabel 2. Informan Penelitian

2) Objek Penelitian

Dalam setiap penelitian penulis membutuhkan objek penelitian, objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang hendak dikaji dalam sebuah penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah “Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah”.

3.4. Populasi dan Sampel

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian, maka populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian humas dan pegawai Humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah sembilan orang. Teknik sampel yang penulis gunakan adalah purposive sampling artinya dengan cara mengambil subjek penelitian bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik

ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga penulis tidak mengambil semua sampel penelitian.³⁸

3.5. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan kepala bagian humas dan staf humas dan observasi yang dilakukan

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di bagian Humas.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain :

1) Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, untuk melihat kondisi riil yang terjadi pada bagian humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seorang ahli yang berwenang

³⁸ Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7D, (Bandung : Alfabeta, 2007, hal 217).

dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu pihak Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.³⁹

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti website pemerintah, informasi yang telah dimuat di media massa dan melalui teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara memahami data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan selanjutnya dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Setelah berhasil mengumpulkan data dari lokasi penelitian, langkah selanjutnya ialah menganalisis dan kemudian menyajikan secara tertulis dalam karya ilmiah. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, data conclusion drawig/verification*.

1) Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data dalam penelitian ini artinya merangkum atau mencari pokok-pokok yang paling penting dari setiap data yang diperoleh, jika data yang diperoleh dilapangan semakin banyak maka peneliti harus memfokuskan

³⁹ Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7D, (Bandung : Alfabeta, 2007, Hal 215).

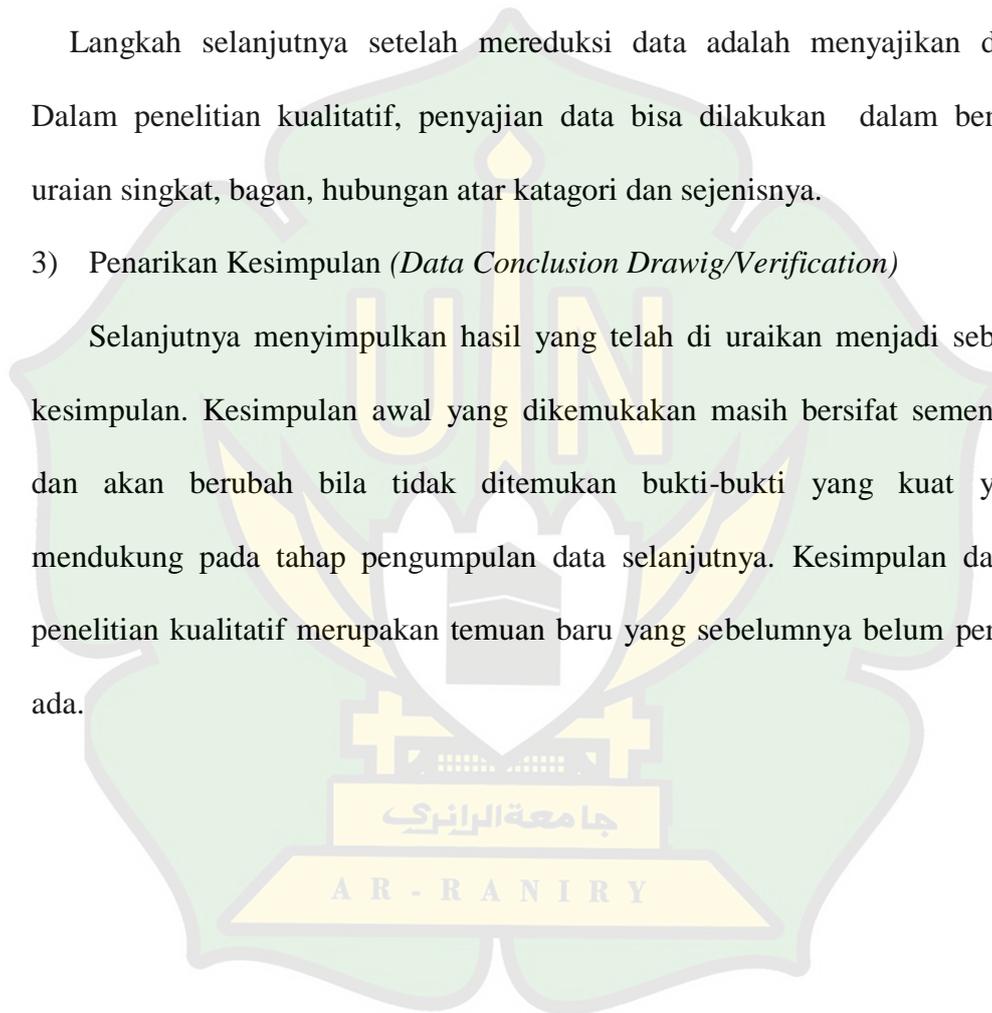
pokok permasalahannya saja. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan sejenisnya.

3) Penarikan Kesimpulan (*Data Conclusion Drawig/Verification*)

Selanjutnya menyimpulkan hasil yang telah di uraikan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Barat

Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. terletak sekitar 175 km tenggara kota Banda Aceh di pulau sumatera. Kabupaten Aceh Barat merupakan kota kelahiran pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan.⁴⁰ Sebelum pemekaran Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² dan merupakan bagian wilayah pantai Barat Selatan Pulau Sumatra, dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Setelah terjadinya pemekaran letak Geografis Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04°06'-04°47' Lintang Utara dan 95°52' - 96°30' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pidie Jaya dan kabupaten Aceh Jaya
- Selatan : Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Hindia
- Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
- Barat : Samudera Hindia⁴¹

⁴⁰ Dukumen RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Barat

⁴¹ Website Pemerintah, *Profil Kabupaten Aceh Barat, Sejarah Kota Meulaboh*, September 2019, Diakses Pada Situs www.acehbaratkab.go.id, Pada Tanggal 9 September 2019 Pukul 10 Wib.

4.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Barat

Penduduk di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2018 berjumlah 210.669 jiwa, terdiri atas laki-laki 107.621 jiwa dan perempuan 103.048 jiwa, kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat termasuk padat. Tingkat kepadatan ini terus bertambah setiap tahunnya disebabkan oleh jumlah kelahiran dan migrasi masuk. Kabupaten Aceh Barat mempunyai 12 kecamatan, memiliki 32 kemukiman dan terdiri dari 322 gampong.⁴²

*Tabel 3.
Data Kependudukan Kabupaten Aceh Barat*

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Johan Pahlawan	35.863	34.116	69.079
2	Kawai XVI	11.459	11.165	22.625
3	Sungai Mas	2.325	2.183	4.508
4	Woyla	7.192	7.122	14.314
5	Samatiga	8.499	8.049	16.584
6	Bubon	3.622	3.484	7.106
7	Arongan Lambalek	6.620	6.235	12.855
8	Pante cermen	5.956	5.765	11.721
9	Meureubo	15.875	14.961	30.836
10	Woyla Barat	4.034	3.928	7.962
11	Woyla Timur	2.623	2.560	5.183
12	Panton Reu	3.553	3.480	7.033
Jumlah		107.621	103.048	210.669

⁴² Website Pemerintah, *jumlah penduduk pada tahun 2018*, Desember 2019, Diakses Pada Situs www.Acehbaratkab.go.id, Pada Tanggal 25 Desember 2019 Pukul 14 Wib.

4.1.3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di pimpin oleh seorang bupati yang saat ini dijabat oleh bapak Ramli Ms. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten Aceh Barat melakukan peningkatan pembangunan di segala bidang, baik dari segi perekonomian, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.⁴³

4.1.4. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Visi pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada periode 2017-2022 adalah “Terwujudnya Aceh Barat yang islami, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas”

Terwujudnya Aceh yang islami adalah visi yang pertama pemerintah kabupaten Aceh Barat, guna membangun masyarakat yang beriman, bertakwa berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengedepankan nilai-nilai islami, serta mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai islami dalam tatanan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat secara efektif

Pembangunan infrastruktur, infrastruktur merupakan organ yang sangat penting demi kelangsungan hidup dalam setiap daerah. Dengan adanya infrastruktur akan terbukanya akses dalam menjangkau setiap daerah, dan akan memberi kemudahan dalam arus pengiriman barang baik dari dalam maupun dari luar daerah.

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Adapun Misi pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada periode 2017-2022 adalah :

1. Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar'i dan mewujudkan pemerintahan Aceh Barat yang bersih;
2. Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila, UUD 1945.
3. Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA;
4. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti aparatur sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan teungku dayah;
5. Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat-istiadat;
6. Membangun prasarana dan sarana infrastruktur pendukung islam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional;
7. Memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan sumber daya alam (SDA) bidang kesehatan ;
8. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat.⁴⁴

⁴⁴ Visi Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Periode 2017-2022, Agustus 2019 Diakses Dari Situs www.acehbaratkab.go.id Pada Tanggal 23 Agustus 2019, Pada Pukul 16 Wib.

4.1.5. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat

Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat merupakan bagian asisten administrasi umum yang berjumlah sebanyak 9 orang, yang diantaranya 6 orang ASN dan 3 orang tenaga honorer. Staf bagian humas yang dipimpin oleh seorang kepala humas, dan dibantu oleh 3 orang sub bagian humas, yang bertanggungjawab kepada bagian humas yaitu : Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi, Sub Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Data, dan Sub Bagian Publikasi dan Media Elektronik.

1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

Sub bagian pengumpulan informasi dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan berita dan informasi, peliputan dokumentasi dan penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun melalui media teknologi informasi, untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah, dan mendistribusikan bahan-bahan penerbitan serta mengkoordinasikan dokumentasi pelaksanaan tugas bidang kehumasan.

2. Sub Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Data

Sub bagian pemberitaan dan pengelolaan data mempunyai tugas melakukan urusan peliputan, pemberitaan, dan mengelola data serta mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan pekerjaan.

3. Sub Bagian Publikasi dan Media Elektronik

Sub bagian publikasi dan media elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan dan penyusunan petunjuk teknis

pembinaan dan pengembangan hubungan kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun dalam bentuk publikasi media elektronik.⁴⁵

Tabel 4. Pegawai Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat

No	Nama	Jabata
1	Amril Nuthihar, S.Ip.MAP	Kabag Humas
2	Dedy Jefernai, ST	Kasubag Pengumpulan Informasi Dan Dokumentasi
3	Andi Kurniawan, SE	Kasubag Pemberitaan Dan Pengolahan Data
4	Safriyanti, SE	Kasubag Publikasi Dan Media Elektronik
5	Arlianto	Staf Humas
6	Nyi Mas Ratu Intan, NST	Staf Humas
7	Armayana, A.Md	Staf Humas
8	Safrial Putra, S.AP	Staf Humas
9	Bustami, A,MD	Staf Humas

1) Tupoksi Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat

Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas yaitu, melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang informasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat mempunyai fungsi antara lain ialah:

1. Menyusun rencana operasional kegiatan dan program kerja bagian humas berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.

⁴⁵ Lakip, Humas Setda Kabupaten Aceh Barat, 2018

2. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan.
3. Penyimpanan bahan pembinaan dan pengamanan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
4. Pelaksanaan hubungan media massa dan pers, peliputan dan pemberitaan dan menganalisa informasi untuk penerangan, penerbitan, publikasi, dan dokumentasi informasi komunikasi.
5. Melaksanakan kegiatan dan program kerja pengolahan data elektronik, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.⁴⁶

2) Standar Pelayanan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan standar pelayanan.

Standar pelayanan pada bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Standar pelayanan pendokumentasian naskah, foto, dan audio visual;
2. Standar pelayanan peliputan kegiatan pimpinan daerah;
3. Standar pelayanan pengumpulan dan pemantauan berita media cetak;
4. Standar pelayanan konsultasi/audiensi

⁴⁶ Tupoksi, *Humas Sekretariat Kabuapten Aceh Barat*, September 2019, Diakses Dari Situs www.acehbaratkab.go.id, Pada Tanggal 9 September 2019, Pada Pukul 10 Wib.

5. Standar pelayanan penyusunan pidato;
6. Standar pelayanan pengelolaan data elektronik;
7. Standar pelayanan iklan layanan masyarakat;

Standar pelayanan yang dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggaraan aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau ingin mengajukan suatu permohonan maka masyarakat hendak langsung ke kantor Sekretariat Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu atau daftar tamu, seperti mekanisme di bawah ini:⁴⁷



Gambar 3. Alur Pelayanan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat

⁴⁷ SOP Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat

Keterangan dari mekanisme diatas :

1. Pemohon/masyarakat/penggunaan layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada bupati aceh barat u.p. kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, atau
2. Pemohon/masyarakat/pengguna layanan datang langsung ke bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat (ke bagian yang menangani dokumentasi dan informasi yang diperlukan) dengan menunjukkan identitas pribadi atau instansi.
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bagian humas yang membidangi dokumentasi naskah, foto, dan audio visual yang dibutuhkan.
4. Kepala bagian yang bersangkutan memberikan dokumentasi naskah, foto, dan audio visual yang dibutuhkan kepada pemohon/masyarakat/pengguna layanan.
5. Kepala bagian yang bersangkutan mendisposisikan/menugaskan kasubbag/pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan dokumentasi naskah, foto, dan audio visual yang dibutuhkan.
6. Kasubbag/pejabat/pegawai yang ditunjukan melaksanakan tugas memberikan informasi kepada pemohon/ masyarakat/pengguna layanan.

Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya ditempatkan di ruangan yang terletak di lantai 2 dan dibagi menjadi 2 ruangan.

1. Ruang kepala yang dilengkapi satu stel kursi dan meja, telepon dan dua buah lemari.
2. Ruang komputer dan ruang kasubbag dan staf humas disatukan menjadi satu ruang. Dilengkapi sembilan unit komputer dan printer serta satu dispenser, masing-masing dilengkapi satu stel kursi dan meja, dan dua buah lemari disertai dua buah tempat koran dan tabloid.

Serta dilengkapi dengan alat penunjang untuk kelancaran kerja dan tugas Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat, di antaranya adalah :

1. Satu unit mobil operasional.
2. Sembilan unit komputer, sembilan unit printer dan satu unit printer foto.
3. Tiga kamera video dan tiga buah kamera digital.
4. Ke sembilan komputer terhubung dengan jaringan internet.

4.2. Hasil Penelitian

- 1) Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu penyebaran informasi menjadi mutlak bagi pemerintah sebab penyediaan dan pelayanan segala jenis informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Bahkan dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008 menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara.⁴⁸

Perubahan sistem politik dan pemerintahan yang semakin mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dan demokratisasi dalam keseluruhan langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah, membawa pengaruh yang cukup berarti terhadap mekanisme dan budaya kerja aparatur pemerintah pada berbagai level dan di bidang pengabdian.

Humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat merupakan asisten administrasi umum pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menciptakan suasana yang harmonis antar pegawai, serta sebagai penghubung bagi pemerintah dalam menginformasikan semua kebijakan pemerintah dan informasi program kerja kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

⁴⁸ Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Secara fungsional Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat memiliki peran di antaranya :

1. Pihak humas berupaya memberikan informasi sesuai dengan kebijakan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat.
2. Pihak humas wajib menyerap keinginan publik yang diselenggarakan bagi kepentingan lembaga dan demi tercapainya tujuan bersama

Dalam menyampaikan informasi program kerja kepada masyarakat tentu humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat harus lebih meningkatkan upaya kesadaran masyarakat terhadap program kerja pemerintah, dalam hal ini tentu peran strategi sangat penting dalam merencanakan guna membantu pelaksanaan tugas maupun fungsi kehumasan dalam memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat.

Hasil kegiatan wawancara penulis dengan Bapak Dedy Jefernai ST selaku Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, mengatakan bahwa :

“Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat luas terutama masyarakat Kabupaten Aceh Barat yaitu melalui media massa, baik cetak maupun media teknologi informasi seperti media sosial, dan media online. Dimana semua media kita berikan informasi baik itu informasi tentang kegiatan pemerintah, pembangunan, program kebijakan dan program kerja, untuk dapat disampaikan kepada masyarakat luas”⁴⁹.

⁴⁹ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Dedy Jefernai ST selaku Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan observasi selama penelitian peneliti menemukan bahwa, selain melalui media massa yang ada, humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat juga menggunakan strategi lainnya di dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah diantaranya adalah :

1. Baliho dan spanduk

Baliho dan spanduk digunakan juga dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Baliho dan Spanduk tersebut langsung didesain oleh staf humas bagian informasi dan dokumentasi.

2. Tabloid

Tabloid juga menjadi salah satu sarana humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Seperti tabloid Gema Aceh.

Pernyataan di atas, juga didukung dengan hasil wawancara Bapak Amril Nuthihar, S.Ip, MAP selaku kepala bagian Humas pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mengatakan bahwa :

“Dalam mendukung kegiatan humas dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah daerah pihak kami melakukan empat hal agar informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat diataranya :

1. Bekerja sama dengan wartawan, baik media cetak maupun media elektronik dalam menyebarkan informasi program kerja kepada masyarakat.
2. Melengkapi fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan humas
3. Penggunaan Media sebagai alat komunikasi agar lebih efektif dalam penyampaian informasi tentang program kerja kepada masyarakat.
4. Penggunaan media dalam menyampaikan informasi sangat penting bagi pemerintah.⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Bapak Amril Nuthihar, S.Ip, MAP Selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Lebih lanjut Bapak Amril Nuthihar, S.ip, MAP selaku kepala bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa :

“Untuk bekerja sama dengan media massa, baik media cetak maupun teknologi informasi, yaitu dengan cara pihak humas memberikan informasi atau berita tentang pemerintah kepada setiap media yang ada untuk dapat dipublikasikan. Keterlibatan media sangat menguntungkan pihak humas karena pada dasarnya sangat sulit untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada disetiap wilayah, dapat dikatakan dengan keterlibatan media dapat menjangkau seluruh masyarakat baik dikota maupun dipelosok desa di Kabupaten Aceh Barat”.⁵¹

Lebih lanjut Bapak Dedy Jefernai, ST selaku sub bagian informasi dan dokumentasi, mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kerja pemerintah daerah adalah dengan membuka website pemerintah atau website Humas yang berisikan tentang tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah”.⁵²

Lebih lanjut Bapak Amril Nuthihar, S.ip.MAP selaku kepala bagian humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa :

“Humas memberikan pelayanan di bidang informasi kepada masyarakat secara mudah, cepat dan tepat, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi atau ingin mengajukan suatu permohonan maka masyarakat hendak langsung ke Kantor Sekretariat Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu atau daftar tamu”.⁵³

Lebih lanjut Bapak Dedy Jefernai, ST selaku sub bagian informasi dan dokumentasi mengatakan bahwa :

⁵¹ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Bapak Amril Nuthihar, S.Ip, MAP Selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

⁵² Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Bapak Dedy Jefernai ST selaku Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.

⁵³ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Bapak Amril Nuthihar, S.Ip, MAP Selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

“Didalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kerja pemerintah daerah Humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat tidak bisa terlepas dari dukungan dan peran serta berbagai media, baik media cetak maupaun media elektronik. Dengan penggunaan media tersebut, Humas Sekretariat Kabupten Aceh Barat dapat bisa menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Agar semua masyarakat mengetahui dan memahami semua bentuk program kerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Adapun media cetak sebagai sarana penyebarluasan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat yang digunakan pihak Humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat yaitu seperti surat kabar harian yang terdiri dari : Harian Aceh, Antaranews, Serambi indonesia, Modusaceh, Harian Prohaba.”⁵⁴

Lebih lanjut Bapak Dedy Jefernai, ST selaku sub bagian informasi dan dokumentasi mengatakan bahwa :

“Untuk membantu kelancaran kerja Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarlauskan informasi program kerja pemerintah kepada masyarakat pihak humas juga menggunakan media teknologi informasi di antaranya :

1. Media online

Terdiri dari: website pemeritah, Harian Aceh, Antaranews, Serambi indonesia, Modusaceh, Harian Prohaba, Aceh image, Bisnis tempo, meulaboh post, detiknews, kompas, akurat, suaranews, tribunews.

2. Media sosial

Terdiri dari : Youtube Humas Acehbarat, Whatshapp, Facebokk Humas acehbarat, Instagram Humas acehbarat, email humas@acehbaratkab.go.id, Twiter @humas_Acehbarat”.⁵⁵

Lebih lanjut Bapak Amril Nuthihar, S.ip, MAP selaku kepala bagian humas sekretairiat daerah Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa :

“Humas juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah daerah. kepala Humas harus mengetahui apa saja yang telah

⁵⁴ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Dedy Jefernai ST selaku Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.

⁵⁵ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Dedy Jefernai ST selaku Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.

dilakukan oleh stafnya dalam menyampaikan informasi program kerja yang ada di pemerintah Kabupaten Aceh Barat”.⁵⁶

Lebih lanjut Bapak Amril Nuthihar, S.ip, MAP selaku kepala bagian humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa :

Dalam menjalankan tugas pokok Humas sekretariat Kabuptaen Aceh Barat khususnya dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah, yaitu dengan berpedoman pada tupoksi bagian, dengan tujuan Humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat berusaha untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dalam mensukseskan program kerja pemerintah daerah”.⁵⁷

2) Hambatan Dalam Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarluaskan Informasi Tentang Program Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan di bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat strategi humas dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat di antaranya adalah :

1. Terbatasnya tenaga pegawai di lapangan, sehingga tidak dapat memaksimalkan kinerja humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat.
2. Angka melek huruf yang masih cukup tinggi dalam masyarakat, membuat pihak humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat tidak bisa memaksimalkan kinerjanya, karena dipengaruhi oleh sebagian masyarakat yang masih kurang mampu dalam penggunaan teknologi informasi.

⁵⁶ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Bapak Amril Nuthihar, S.Ip, MAP Selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

⁵⁷ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Bapak Amril Nuthihar, S.Ip, MAP Selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

4.3. Pembahasan

Setelah data disajikan selanjutnya data Tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model interaktif yaitu terkaid dengan pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Jadi analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data

4.3.1. Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah.

Keberadaan humas di lembaga pemerintah merupakan suatu keharusan dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan informasi baik itu tentang kegiatan, program kebijakan, program kerja, maupun pembangunan yang akan ditujukan kepada masyarakat. Peran humas di lembaga pemerintah sangat berkaitan dengan tujuan utama yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, pada dasarnya humas harus bisa memberikan identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan kepada pemerintah.

Program kerja pemerintah akan berjalan dengan baik apabila terjadi pengertian antara pemerintah dengan masyarakat, dimana humas merupakan wadah yang memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai pemberi informasi dan

corong bagi pemerintah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kerja yang telah ditetapkan

Strategi merupakan panduan awal dari perencanaan manajemen yang akan maupun telah direncanakan melalui kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Dalam menyebarluaskan informasi pemilihan strategi harus ditentukan, agar informasi program kerja pemerintah daerah yang disebarluaskan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dapat tersampaikan tepat pada sasaran yang diinginkan dan dapat diterima oleh semua khalayak. Strategi dapat dikatakan juga sebagai rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam lembaga humas, terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat. usaha tersebut untuk menanamkan kesan yang menyenangkan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan jujur, sehingga publik dapat menaruh kepercayaan kepada pemerintahnya dan ikut serta dalam usaha yang direncanakan pemerintah.

Dari penjelasan diatas, Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan tugas maupun fungsinya dengan semaksimal mungkin, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Dedy Jefernai ST selaku Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, yang mengatakan bahwa Humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat akan selalu menginformasikan program kerja pemerintah kepada masyarakat dengan memilih strategi yang benar-

benar efektif agar informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan media massa, baik cetak maupun teknologi informasi seperti media sosial, dan media online. Informasi yang disampaikan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat berdasarkan fakta yang ada. Karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Sehingga masyarakat diharapkan dapat ikut serta dan berperan aktif dalam program kerja pemerintah.:

1) Pemanfaatan Media Massa

1. Media Online

Pada era globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat cepat hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan informasi semakin hari semakin meningkat, informasi tersebut tentunya diperoleh melalui media salah satunya media online. Media online merupakan media berbasis telekomunikasi dan multimedia yang hanya bisa diakses melalui internet. Jenis media online yang dimiliki pihak humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarkan informasi terdiri dari: website pemerintah, media pemberitaan seperti Harian Aceh, Antaranews, Serambinews, Modus Aceh, Harian Prohaba, Aceh Image, Bisnis Tembo, Meulaboh Post, Detiknews, Kompas, Akurat, Suaranews, Republiknews. .

2. Media Sosial

Media sosial adalah media komunikasi melalui dunia maya tanpa harus mengenal jarak dan bisa dipergunakan oleh semua khalayak. Dengan berkembangnya media sosial yang muncul dalam masyarakat dapat menguntungkan banyak pihak seperti pihak humas sebagai pusat informasi publik. Pada dasarnya Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat telah memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Bentuk media sosial yang dimiliki yaitu terdiri dari : Youtube Humas Aceh Barat, Whatsapp, Facebook Humas Acehbarat, Instagram Humas Acehbarat, Email Humas@Acehbaratkab.go.id, Twiter [@Humas_Acehbarat](https://twitter.com/Humas_Acehbarat).

3. Media cetak

Media cetak merupakan media yang berbentuk lembaran dengan jumlah kata, gambar, atau foto. Fungsi utama dari media cetak ini adalah memberi informasi dan sekaligus menghibur. Media cetak merupakan media massa yang ketiga yang digunakan pihak Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarkan informasi. Bentuk dari media cetak itu sendiri yaitu seperti surat kabar harian, spanduk, baliho, dan tabloid.

Surat kabar harian merupakan salah satu media informasi yang digunakan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarkan informasi diantaranya surat kabar harian seperti Harian Aceh, Antaranews, Serambinews, Modusaceh, Harian Prohaba, Republiknews.

Media cetak yang lainnya seperti baliho, spanduk dan tabloid juga menjadi tempat Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarkan informasi publik.

2) Bekerja Sama Dengan Wartawan Media Massa

Dalam menyampaikan informasi ke pada masyarakat Humas sekretariat Kabupaten Aceh Barat menjalin kerja sama yang baik dengan wartawan media massa atau dengan media massa, dengan cara memberikan setiap informasi atau berita baik itu kegiatan, kebijakan, program kerja maupun pembangunan pemerintah untuk dapat dipublikasi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat karena media massa merupakan saluran penyampaian informasi yang sangat efektif yang dapat mencapai jumlah massa yang besar serta lebih cepat.⁵⁸

Sasaran yang akan dituju Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat adalah menjalin hubungan komunikasi yang baik yang efektif dengan masyarakat serta menjalin kemitraan dengan media massa, dengan cara memberikan salinan informasi atau berita kepada setiap media yang ada untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Selain itu juga Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat menginformasikan program kerja secara aktual melalui media massa, baik media cetak maupun media teknologi informasi seperti media online dan media sosial.

⁵⁸ Hasil Wawancara 22 Agustus 2019 Dengan Bapak Amril Nuthihar, S.Ip, MAP Selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Hal ini dilakukan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam rangka memberikan informasi tentang program kerja pemerintah daerah, agar masyarakat mengetahui tentang program kerja yang ada dan pada akhirnya masyarakat ikut serta dalam memberikan masukan dan kritikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Dapat disimpulkan bahwa Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat tidak hanya berfungsi sebagai corong bagi pemerintah dalam menyebarkan informasi program kerja, akan tetapi Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat juga harus dapat ikut serta dalam memikirkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sehingga humas mampu memberi penjelasan-penjelasan kepada masyarakat.

4.3.2. Hambatan Dalam Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Menyebarkan Informasi Tentang Program Kerja Pemerintah Daerah.

1) Latar Pendidikan yang Berbeda

Terbatasnya kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu hambatan yang mendasar Bagi Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat, disebabkan angka melek huruf yang masih cukup tinggi dalam masyarakat Kabupaten Aceh Barat, maka akan menjadi hambatan dalam strategi informasi yang ditetapkan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat, seperti media online dan media sosial.

Karena dipengaruhi oleh sebagian masyarakat yang masih kurang mampu dalam penggunaan teknologi informasi.

Tabel 4. Angka Melek Huruf Masyarakat Kabupaten Aceh Barat

URAIAN	2016	2017	2018
Lak-Laki	97,23	98,53	98,76
Perempuan	94,24	95,45	94,69

Angka melek huruf sebagai cerminan tingkat pendidikan penduduk Aceh Barat usia 18 tahun keatas termasuk tinggi yaitu 90%. Selama tahun 2016-2018 angka ini mengalami peningkatan ditahun 2017. Seluruh penduduk Kabupaten Aceh Barat terdapat sekitar 3-4 persen yang buta huruf. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa angka melek laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.⁵⁹

2) Terbatasnya Jumlah Pegawai di Lapangan

Selain itu yang menjadi hambatan dalam pekerjaan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu kurangnya jumlah pegawai di lapangan, kepadatan agenda pemerintah jelas tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang, sehingga tidak dapat memaksimalkan kinerja Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah.

⁵⁹ RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa Strategi pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya bagian humas Dalam Menyebarkan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat di antaranya sebagai berikut :

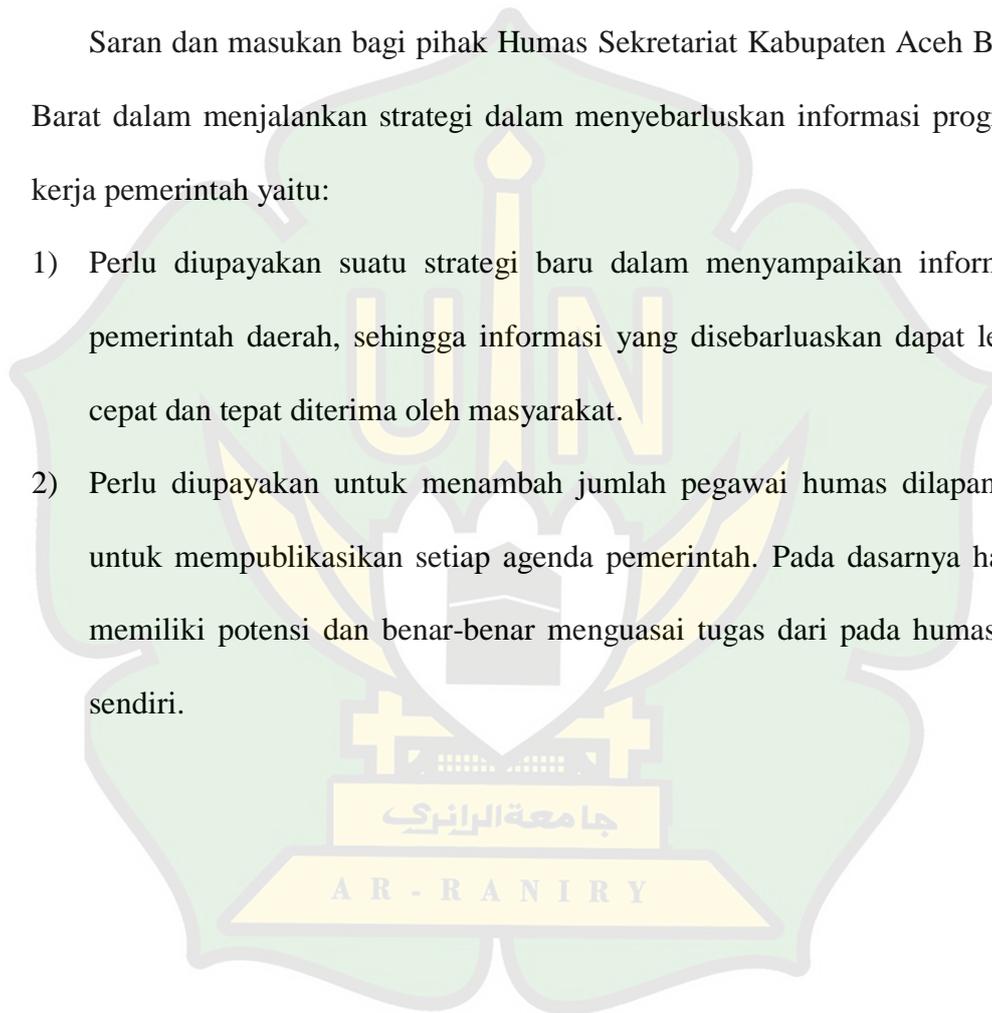
- 1) Melalui media massa, seperti media cetak dan media teknologi informasi, seperti surat kabar harian, baliho, spanduk, tabloid, media online dan media sosial.
- 2) Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat juga melakukan rencana yang optimal sebelum informasi program kerja disampaikan kepada masyarakat.
- 3) Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat juga menyajikan berita-berita seputar kegiatan yang telah dilaksanakan melalui website pemerintah sehingga informasi bisa cepat sampai kepada masyarakat.
- 4) Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat juga bekerjasama dengan wartawan serta dengan media massa agar informasi program kerja pemerintah dapat tersampaikan ke semua masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

Hambatan yang terdapat dalam strategi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah, yaitu latar pendidikan yang berbeda serta terbatasnya jumlah pegawai dilapangan.

5.2. Saran

Saran dan masukan bagi pihak Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat Barat dalam menjalankan strategi dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah yaitu:

- 1) Perlu diupayakan suatu strategi baru dalam menyampaikan informasi pemerintah daerah, sehingga informasi yang disebarluaskan dapat lebih cepat dan tepat diterima oleh masyarakat.
- 2) Perlu diupayakan untuk menambah jumlah pegawai humas dilapangan untuk mempublikasikan setiap agenda pemerintah. Pada dasarnya harus memiliki potensi dan benar-benar menguasai tugas dari pada humas itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurrahman, Nana, Herdiana, *Manajemen Pemasaran Strategi*, (Bandung: Cv Pustaka Setia : 2015).
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).
- Butterick, Keiith, *Pengantar Public Relations Dan Praktik*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014).
- Coulson, thomas chollin, *pubik relation : pedoman praktis untuk humas* (jakarta, bumi aksara,2002)
- Ceverthon, Peter, *Manajemen Library The Essential Guide To Brand Manajemen*, (New Delhi: Kogan Page India Pvt. Ltd : 2015).
- Forum, Humas, Indonesia, *Reposisi Publik Relations Dalam Era Baru Indonesia*, (jakarta 2002)
- Iriantara, Yosol, *Media Relations Konsep, Pendekatan, Dan Praktik*, (Bandung: Simbosa Rakatama Media, 2008).
- Kriyantono, Racmad, *Public Relation Writing*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- M. Yunup, Pawit, *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Perpustakaan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Moch, Irfan, Rusdiana, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014).
- Mukarom, Zainal, Wijaya, Laksana, Mahibubuddin, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015).
- Rachmat, Gunawan, Dadang, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016)
- Ruslan, Rosady, *Manajemen Publik Relations Dan Media Komunikasi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada) hal. 26
- Susanto, Bg, *Manajemen Startegi Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015).

Sugiono, *Penelitian Kualitatif Dan R7D*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

Tjiptono, Fandi. (*Pemasaran Strategik*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2012).

Widjaja, H.A.W, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004).

Sumber Jurnal Ilmiah

Audah, Mannan, Mutmainnah, “Aktifitas Humas Pada Bidang Pengaduan Pemerintah Kota Makasar Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah” *Ejurnal komudifikasi*, Volume 5.

Muhammad Aras, “Kegiatan Government Publik Relation Dalam Membangun Kominikasi Dengan Dunia Persamaa”, *Jurnal Marketing Komunication Dapartermen Fakulti Of Ekonomic And Comunication*.

Rio, Muhammad, “penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Klanten” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Wawan, Wahyudi, “Strategi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Informasi dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No.2.

Yus, Sugianto, Posu, “Kinerja Bagian Humas Dalam Dalam Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah” Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2019.

Sumber Penerbitan Online

Husaeri, Priatna, *Program Kerja*, Diakses pada tanggal 27 Maret 2019 dari situs <https://www.sildeshere.net>.

Media Online, Diakses Tanggal 15 September 2019 dari situs <http://www.romelteamedia.com>.

Media Sosial, diakses pada tanggal 15 September 2019 dari situs <http://prezi.com/vddmcub-s/sosial-nedia-definisi-fungsi-karakteristik/>

Perspektif Baru Bisnis Dan Ekonomi, *Program Kerja Jadi Syarat Sukses Berbisnis*, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2019 dari situs <https://Www.Wartaekonomi.Co.Id>

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, *Peluncuran Daftar Informasi Publik Kabupaten Aceh Barat*, Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2020 Dari Situs <https://aceh.antaraneews.com>

UKM KSR PMI Unit UNITA, *Program Kerja*, Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2019 dari situs <http://Www.Bimbingan.Org/>

Website, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, *Profil Kabuapten Aceh Barat* Diakses pada tanggal 19 September 2019 dari situs <http://acehbaratkab.go.id>

Website, Pemerintah Kabupetan Aceh Barat, *Tugos Pokok dan Fungsi Humas*. Diakses pada tanggal 9 September 2019 dari situs <http://acehbaratkab.go.id>

Website, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, *Visi Misi Periode 2017-2022*, Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2019 dari situs <http://acehbaratkab.go.id>

Website, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, *Lauching Daftar Informasi Publik (DIP)*, diakses pada tanggal 13 januari 2020 dari situs <http://acehbaratkab.go.id>

Sumber Penerbitan Pemerintah

Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

LAKIP Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat 2018

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia, *Permendagri, Nomor 13 Tahun 2011*, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Aceh Barat No 22 Tahun 2015 Tentang RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016

RPJM Bidang Cipta Karya Kabuapten Aceh Barat.

RPJM pemerintah kabupaten aceh barat tahun 2012-2017

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 87/Uin.08/FISIP/Kp.07.001/2019

TENTANG

PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan.
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011, tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemastian yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Uin.08/R/Kp.07.001/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Menunjuk Saudara | Sebagai pembimbing pertama |
| 1. Ade Irma, B.H.Sc., MA, | Sebagai pembimbing kedua |
| 2. Mira Fanziki, S.Sos., M.Si. | |
| Untuk membimbing siswa | |
| Nama | Sarla Ananta |
| NIM | 1908020057 |
| Program Studi | Ilmu Administrasi Negara |
| Judul | Strategi Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) dalam Menyebarluaskan Informasi tentang Program Kerja Pemerintah Daerah |
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

AR-RANIRY



Banda Aceh
14 Januari 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Raut Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: isip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 1676/Un 08/FISIP/PP.00.9/08/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

05 Agustus 2019

Kepada Yth,

Kepada Bagian Humas

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Siti Ananda
NIM : 150802057
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Strategi Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) dalam Menyebarkan Informasi tentang Program Kerja Pemerintah Daerah.
Lokasi Penelitian: Kantor Bupati Aceh Barat, Studi di Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

[Signature]
Heriza Dewit

AR-RANIRY



FEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Jalan Gajah Mada Telp. (0665) 7551164 ; Fax. (0665) 7551162 - 7551185
www.acehbaratkab.go.id ; E-Mail : humas@acehbaratkab.go.id
MEULABOH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/III/IX/2019

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Ananda
Nim : 150802057
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan pengambilan data di Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat terhitung dari tanggal 19 s.d 23 Agustus 2019, dengan judul penelitian : **"STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI TENTANG PROGRAM KERJA"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 24 Agustus 2019
Kepala Bagian Humas
Setdakab Aceh Barat


AMRIL NUTHIHAR, S.IP., M.A.P.
NIP. 19880616 200701 1 004

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KUISIONER
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM
MENYEBARLUASKAN INFORMASI PROGRAM KERJA
(Studi Di Bagian Humas Sekdakab Aceh Barat)

Tanggal : 22 agustus 2019

Waktu : 10 Wib

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Amril Nuthihar, S.Ip, MAP

Jabatan : Kepala Bagian Humas Sekretariat Aceh Barat

Wilayah kerja : Kantor Bupati Aceh Barat

1. Strategi apa saja yang ditetapkan oleh PEMKAB selama proses penyebaran informasi program kerja dari pemerintah ?
2. Bagaimana strategi Humas SEKDAKAB untuk menarik minat dan perhatian dari masyarakat luas khususnya melalui media
3. Bagaimana proses penentuan strategi penyebaran informasi tentang program kerja pemerintah ?

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Dedy Jefernai, ST

Jabatan : Sub Bagian Informasi Dan Dokumentasi

Wilayah kerja : Kantor Bupati Aceh Barat

1. Aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam membuat sebuah strategi?
2. Dalam menerapkan strategi hal-hal apa saja yang dilakukan *public relations* (humas) dalam mempromosikan program kerja yang ditetapkan oleh pemerintah ?
3. Bagaimana langkah-langkah untuk menetapkan strategi yang dilakukan Humas SEKDAKAB ?
4. Apakah ada keterkaitan pihak lain untuk membantu strategi pihak kehumasan dalam mempromosikan program kerja dari pemerintah ?
5. Seberapa efektifkah strategi tersebut bisa menunjang keberhasilan program kerja pemerintah ?
6. Dari sejumlah strategi yang anda tetapkan ada apa tidak startegi yang tidak berjalan ?
7. Dari setiap strategi yang tetapkan dampak dari startegi tesebut apa sudah dirasakan oleh masyarakat ?

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Dedy Jefernai, ST

Jabatan : Sub Bagian Informasi Dan Dokumentasi

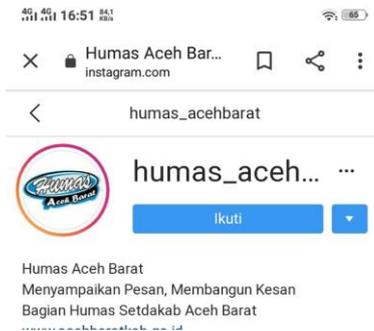
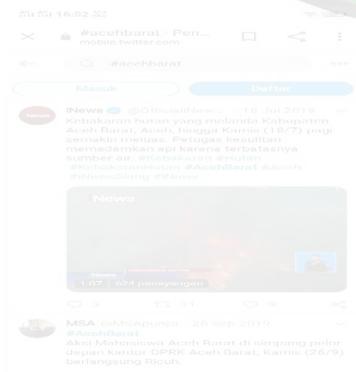
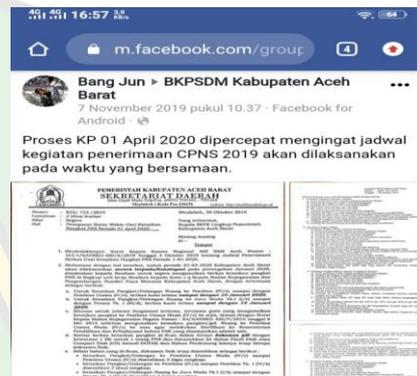
Wilayah kerja : Kantor Bupati Aceh Barat

1. Kendala apa-apa saja yang dihadapi selama proses penyebarluasan informasi mengenai program kerja ?
2. Cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sedang terjadi selama proses penyebarluaskan informasi ?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan *public relations* (humas) kantor bupati Aceh barat dalam mempromosikan program kerja yang ditetapkan oleh pemerintah ?
4. Apa kelebihan dan kekurangan sosial media yang pihak SEKDAKAB hadapi ?
5. Seberapa besar peran media sosial dalam menyukseskan program kerja dari pemerintah ?
6. Bagaimana cara instansi Humas dalam menjaga hubungan baik agar tetap terjalin antara mesyarakat dengan pemerintah ?
7. Bagaimana cara mengontrol agar program dari pemerintah tersebut berjalan dengan optimal ?
8. Seberapa penting keberadaan *public relations* (humas) dalam menyebarkan informasi tentang progaram kerja ?



DATA MEDIA 2017		NAMA WARTAWAN	
1.	HARIAN ACEH	1. Muhammad Idris	2. Koordinator Iqbal
2.	ANTARA NEWS	1. Arwan	2. Arwan
3.	HARIAN PROFABA	1. Andre Nis	2. Andre Nis
4.	KOMPAS	1. Kabiro: Wahyu Widada	2. Kabiro: Wahyu Widada
5.	TRIBUN NEWS	1. Kabiro: Daryanto	2. Anggota: 1. Jansad
6.	ACEH IMAGE	1. Syarif Kusnadi	2. Agus Haryanto
7.	MELIS ACEH	1. Dedi Sulamono	2. Dedi Sulamono
8.	RR.CO.ID MEULABOH	1. Kabiro: Didik Sukoyo	2. Anggota: 1. Firdaus
9.	DETIK NEWS	1. Agus Juli Setiawan	2. Rizki Setiawan S.Pd
10.	TEMPO	1. Abdul Wahid	2. Abdul Wahid
11.	SUARA NEWS	1. Subarsono	2. Subarsono
12.	AKURAT NEWS	1. Suwanto	2. Suwanto
13.	RENCONG POST	1. Yusi Efendi	2. Yusi Efendi
14.	GONEWS	1. Mas Hary	2. Mas Hary
15.	INEWS	1. Kabiro: Edy Djusady	2. Anggota: 1. Hamidin
16.	SINDONEWS	1. Anggota: 2. Herdik	2. Herdik
18.	REPUBLIK NEWS	1. Kabiro: M. Sogiono Z	2. Anggota: M. Haidi
19.	WASPADA	1. Kabiro: Muklis Adi	2. Wartawan: 1. Bahri
		1. Ocha Ari F	2. Iffa
		1. Samsul Bahar	2. Samsul Bahar

3) Media Sosial Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat



4) Media Cetak Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Barat



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Sinta Ananda
Tempat/ Tanggal Lahir : Krueng Batee, 2 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum Kawin
Alamat : Krueng Batee, Kec. Kuala Batee, Kab. ABDYA
No.Hp : 0821 7611 1935
Email : Sinta.uin@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : Nawardi
b. Pekerjaan : Tani
c. Ibu : Yusniar
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat : Krueng Batee, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 1 Krueng Batee
b. SMP : SMPN 2 Kuala Batee
d. SMA : SMKN1 Babahrot
e. Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh